

TIGA TAHAP PERKEMBANGAN KEINDONESIAAN

Oleh Nurcholish Madjid

Keindonesiaan mengenal tiga tahap perkembangan utama. Dengan menggunakan jargon perpolitikan populer kita, ketiga tahap itu ialah “Orde Lama”, Orde Baru”, dan “Orde Reformasi”.

Sudah tentu tokoh sentral Orde Lama ialah Bung Karno. Dialah yang pertama kali menghadapi tantangan mewujudkan secara nyata wawasan kebangsaan modern Indonesia. Dalam banyak hal dia berhasil (Indonesia bersatu, dan tumbuh menjadi “*coporate nation*” yang paling teguh di kalangan bangsa-bangsa baru). Namun tidak mungkin mengingkari kegagalan Bung Karno, yang sistemnya menjerumuskan bangsa kepada malapetaka politik Gestapu/PKI 1965. Terbayang bahwa mungkin sesungguhnya Bung Karno agak terlambat menyadari belum adanya prasarana sosial-budaya guna menopang sebuah konsep kenegaraan modern. Untuk mengatasinya secara mendesak Bung Karno mencanangkan agenda “*nation building*”, tetapi menemui kemandekan akibat titik-tolakannya yang tidak tetap (terlalu banyak bersandar kepada unsur Marxisme dengan bayak mengingkari “*main stream*” Keindonesiaan yang lebih meliputi seluruh wilayah budaya Indonesia, yaitu budaya Keislaman).

Pak Harto sebagai tokoh sentral Orde Baru mencoba mengatasi persoalan warisan Bung Karno itu, dengan menggabungkan antara pandangan hirarkis militer yang berpola ketaatan garis komando atasan kepada bawahan yang ketat di satu pihak, dan konsep strati-

fikasi sosial budaya Jawa yang berpola ketaatan paternalistik serba tertutup di pihak lain. Sekalipun Pak Harto bersikap sangat pilih-pilih terhadap budaya Jawa yang hendak digunakannya (sehingga juga banyak gejala perlawanan kepadanya atas nama segi lain budaya Jawa, seperti yang dilakukan oleh Warsito, Permadi dan Subadio Sastrosatomo), namun sistem Orde Baru ternyata efektif selama tiga dasawarsa. Karena pilihan titik-tolak sosial-budayanya yang cukup eksklusif itu (yakni, berat Jawa dan militer), maka sistem Pak Harto banyak sekali mengakibatkan marginalisasi berbagai kelompok kemasyarakatan (*social communities*), baik yang bersifat keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan seterusnya. Rasa ikut punya kelompok-kelompok itu sangat lemah, dan semakin lemah mengikuti perpanjangan masa kekuasaan Orde Baru, sampai akhirnya Orde itu runtuh. Dengan begitu Pak Harto pun tidak sepenuhnya berhasil mewujudkan cita-cita pembentukan sebuah “*modern nation state*” Indonesia. Tanpa mengingkari berbagai segi keberhasilannya di bidang lain, namun cukup jelas bahwa obsesi Pak Harto kepada pembangunan ekonomi telah membuatnya mengabaikan agenda “*nation building*” yang telah dimulai Bung Karno. Dengan kata lain, sistem Pak Harto runtuh akibat pembangunan bangsa yang tertunda (“*delayed nation building*”).

Orde Reformasi baru menginjak tahap permulaan yang sangat dini, sehingga yang dihadapi sekarang ialah realisasi agenda-agenda reformasi itu sejak saat ini dan seterusnya. Modal dasar untuk realisasi agenda-agenda itu dapat dikata sudah ada di tangan, khususnya dalam bentuk kebebasan-kebebasan asasi seperti menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Tantangannya ialah, *pertama*, bagaimana menangkal kemungkinan sabotase dan usaha pembatalan modal dasar itu, kemudia, *kedua*, bagaimana mengukuhkan dan membinanya. Karena kebebasan-kebebasan asasi (*fundamental-freedoms*) adalah landasan penting demokratisasi, maka diperlukan suatu bentuk komitmen yang lebih mendalam kepada nilai-nilai itu, yang menghendaki adanya persepsi kepadanya sebagai nilai-nilai prinsipil, bukan sekadar nilai-nilai prosedural.

Nilai-nilai itu berpangkal dari kebebasan nurani. Yaitu kebebasan dari setiap bentuk pemaksaan, sekalipun pemaksaan yang dilakukan atas nama kebenaran mapan (*established truth*), sesuatu yang jelas benar dan baik. Seorang manusia harus dibiarkan dengan kesediaan menanggung risikonya sendiri, juga baik dan buruk, bahagia dan sengsara. Sebab yang benar jelas berbeda dari yang salah, yang sejati jelas berlainan dari yang palsu. Manusia, dalam suasana kebebasan dan kejujuran hati nuraninya, akan mampu membedakan, menangkap dan mengikuti mana yang benar dari yang salah, yang sejati dari yang palsu.

Dalam persimpangan jalan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita yang amat penting sekarang ini, prinsip-prinsip kebebasan nurani dalam semangat kemanusiaan universal tersebut di atas sungguh harus mulai menjadi acuan serius bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip itu merupakan dasar dan titik-tolak bagi segenap usaha mengembangkan dan menegakkan kesadaran akan hak-hak asasi dan demokrasi, sejalan dengan tekad dan cita-cita bangsa sebagaimana didambakan dalam proses reformasi itu. Tidak seorang pun dari kita yang boleh dibiarkan menyisihkan hak istimewa untuk dirinya sehingga terbebas dari kewajiban memenuhi tuntutan nilai-nilai reformasi itu. Hak dan kewajiban setiap pribadi warga negara adalah sama. Hak seseorang terhadap yang lain adalah kewajiban orang lain itu, dan kewajiban seseorang terhadap orang lain adalah hak orang bersangkutan.

Seperti halnya nilai luhur tidak dengan sendirinya terwujud dalam masyarakat tanpa kesungguhan mengusahakannya, maka demikian pula hak-hak asasi itu juga tidak akan terwujud tanpa pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga yang memiliki komitmen dan ketulusan batin untuk memperjuangkannya. Maka kini, dalam simpang jalan perjalanan bangsa kita ini, tindak lanjut logis dari pembangunan bangsa yang amat prinsipil antara lain ialah memperjuangkan hak-hak asasi sebagaimana dikehendaki reformasi. Berkaitan dengan sumber-sumber kekuasaan, dalam masyarakat secara minimal harus ditegakkan hak-hak yang tak

terpisahkan dari perikehidupan yang sentosa, yaitu hak-hak pribadi untuk hidup dan memperoleh jaminan keamanan atas hidupnya itu; hak-hak pribadi untuk tidak disiksa, baik fisik maupun mental; hak-hak pribadi untuk memperoleh pengadilan yang tidak memihak, yang fair; hak-hak pribadi untuk tidak mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Pelanggaran atas hak-hak pribadi tersebut akan merupakan pelanggaran hak asasi yang paling telanjang. Pelanggaran atas hak-hak itu juga merupakan penyelewengan yang paling gawat dari cita-cita reformasi. Dan karena hak-hak itu ada dalam konteks kekuasaan, maka usaha melindungi dan menegakkannya memerlukan sistem dan tatanan kekuasaan yang adil, yang fair, yang tidak memihak kepada kepentingan diri sendiri dan golongan. Yaitu sistem kekuasaan yang tidak terpengaruh oleh perasaan suka-tidak-suka. Yaitu suatu kekuasaan yang sanggup menegakkan keadilan sekalipun terkena kepada diri sendiri.

Mewujudkan beberapa prinsip yang mendasari kebebasan nurani di atas sangat mendesak, dan diharapkan dapat terwujud dalam era reformasi ini. [✧]